

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bongenaar Karel E. M., *Aturan Dalam Norma*”, Majalah Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1992.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dikutip dari Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Buku Kedua, sinar grafika, Jakarta.

Hadjon Philipus M.,”*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsip penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi*, Surabaya; Peradaban, 2007.

Harsono Boedi , *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya - Jilid I*, Cetakan kedelapan Jakarta : Djambatan, 2008.

Harsono Boedi *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria : Isi dan pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta, 2003.

HS Salim , 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan ke-10, Raja Grafindo, Jakarta.

HS Salim, *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Kashadi dan Purwahid Patrik , *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

Khairandy Ridwan, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*, Bagian Pertama, Cetakan Pertama, FH UII Press.

Marjuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, kencana prenatal media group, Jakarta.

Masjchoen Sofwan Sri Soedewi, *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok – Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty, 1980.

Murjiyanto R dan Wibawanti Erna Sri dan, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Yogyakarta: Liberty, 2013.

Santoso Urip, *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Soekanto Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soetiono, *Rule Of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Sutedi Adrian, *Hukum Hak Tanggungan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Thalib Hambali, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konfik Pertanahan*, Kencana; Jakarta 2009.

Thamrin Husni, *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*, Yogyakarta: Laksbag Pressindo, 2011.

Tje Edy Putra “ Aman, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Yogyakarta; Liberty, 1989.

Untung Budi, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2015.

Widjaja Kartini Muljadi Gunawan, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan Hak Tanggungan*, edisi pertama cetakan ke -2, Kencana, Jakarta.

Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penleitan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Jurnal/Artikel/Tesis

Hetty Hasanah, Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/>.

I Putu Arwan Puspa Resmawan, Tahun 2018, “ *Implikasi Pendaftaran Hak Tanggungan Berbasis Komouterisasi Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung*”, Program Studi Magister Kenotariatan Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nadira, Nurul, 2019, pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik yang akan mulai dilaksanakan di Badan Pertanahan”, Jurnal Ilmiah Hukum, Volumen 17 Nomor II Bulan November, Universitas Muhammadiyah Jember.

Ovryan Berthafara Ayasisca, 2020, *Kesiapan Penerapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen.*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Rizal, Ronal, 2020 “Akibat Hukum Pendaftaran Hak Tanggungan Yang Melewati Batas Waktu di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat”, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Undang-undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/Kep-4.1/IV/2017

Peraturan Menteri Agrari dan Tata Ruang/Kepala BaDAN Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tta Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penerapan TandaTangan Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 2020 tentang Hak Tanggungan elektronik.

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

D. Internet

Atrbpn, Hak Tanggungan Elektronik, diakses pada tanggal 01 Maret pada Pukul 07.47 WIB, melalui <https://docs.atrbpn.go.id/hitel/bank/hitel/>

Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi, <http://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>, Diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 21.57

Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/indung> di akses pada tanggal 17 oktober 2020 Pukul 08.25

Kamus Hukum Online <http://kamusbahasaindonesia.org/hukum>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021, Pukul 19.10

Perlindungan Hukum, 2014 <http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindunganhukum.html>, diakses pada tanggal 11 Februari 2021 pukul 18.34 WIB

Shallmanal Farizy, *Mengenal Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, diakses pada tanggal 12 Februari 2021 Pukul 16.00 WIB, <https://shallmanalfarizy.com/mengenal-pejabat-pembuat-akta-tanah-ppat/>